

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Patty, 2025).

Menurut (Friedlander dalam Fahrudin, 2014:9) menjelaskan bahwa:

“Social welfare is the organization of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfactory standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and their community”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Soeharto 2014:1).

Kesejahteraan sosial memiliki pengertian yang luas. Menurutya kesejahteraan sosial adalah ketikakeadaan manusia yang baik atau sejahtera yang wujudnya apabila masalah-masalah sosial terkendali (*social problems are managed*), apabila kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi (*human needs are met*), dan apabila kesempatan-kesempatan sosial dimaksimalkan (*social opportunities are maximized*) (Midgley dalam Huraerah, 2011:29).

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu mengembalikan keberfungsian pada setiap orang, kelompok dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat, dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan taraf hidup (Fachrudin dalam Az-Zahra, 2018).

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi klien (Taufiqurokhman, 2016:4). Tiga tujuan utama dari kesejahteraan sosial yaitu:

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat.

2. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi, mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

3. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi seluruh anggota masyarakat (Fahrudin, 2014:10).

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa fungsi yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain (Friedlender dan Apte dalam Anggleni, 2018).

2.1.4. Usaha Kesejahteraan Sosial

Dalam UU No 6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengimbangkan kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No 11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Usaha kesejahteraan sosial sesungguhnya merupakan pengembangan lembaga sosial tradisional untuk menyediakan layanan berbagai kondisi dari ketergantungan kelompok rentan dan disabel ditengah masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas (makro) usaha kesejahteraan sosial demikian disebut dengan konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*). Secara teoretis, Suharto (2006)

menjelaskan bahwa negara kesejahteraan harus berusaha untuk melindungi seluruh warganya pada kondisi sebaik mungkin (Purwowibowo, 2011).

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya hanya disebut pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, instansi, atau lembaga tertentu, hal tersebut bertujuan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, akan tetapi usaha yang diberikan harus berjalan sesuai sistem dalam hal mewujudkan pengembangan kesejahteraan sosial sehingga mampu memelihara dalam proses dan pengakhirannya (Az-Zahrah, 2018).

Usaha kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan (Friedlender dalam Fachrudin, 2014:15).

2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang memusatkan perhatiannya pada keberfungsian sosial. *“The core of social worker and the client interacting in relation to present or potensial problems in social functioning, problems in social functioning are the reason for their worker client interaction”* (Johnson dalam Huraerah, 2024).

Definisi pekerjaan sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, serta

pemberdayaan dan pembebasan masyarakat (*International Feration of Social Work*, 2014).

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Profesi ini berfungsi untuk melakukan analisis kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial, mengembangkan sumber daya manusia, melakukan penyembuhan sosial, rehabilitasi sosial, mencegah timbulnya masalah sosial, memberdayakan kelompok rentan, dan lain sebagainya (Purwowibowo, 2011).

2.2.2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Praktik pekerjaan sosial memiliki beberapa tujuan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemecahan masalah yang maksimal, menangani, dan meningkatkan perkembangan kapasitas setiap orang (*enhance the Problem-Solving, Coping and Developmental Capacities of People*).
2. Menjadi penghubung antara individu denganrangkaian struktur yang menyediakan sumber daya, layanan, dan peluang (*Link people with systems that provide then with resources, services, and opportunities*).
3. Menyebarluaskan efektivitas dan operasional sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan manusiawi (*Promote the effectiveness and human operation of system that provide people with resources and services*).
4. Meningkatkan perkembangan kebijakan sosial (*Develop and improve social policy*).

5. Menyebarluaskan kesejahteraan manusia maupun komunitas yang lebih baik (*Promote human and community well-being*) (Zastrow dalam Sukmana, 2022).

2.2.3. Ruang Lingkup Intervensi Pekerjaan Sosial

Secara etimologi, intervensi berasal dari kata atau bahasa Inggris yakni *intervention*, kata ini artinya campur tangan atau pelibatan seseorang atau lembaga/negara dalam masalah seseorang, kelompok dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan strategi tertentu. Sedangkan kata intervensi pada dimensi sosial yaitu bentuk keterlibatan atau campur tangan antara dua belah pihak dalam proses penyelesaian atau penuntasan masalah sosial yang dihadapinya, di mana dilakukan secara terencana dan prosedural. Berkaitan dengan hal ini intervensi dapat juga dipahami sebagai tindakan spesifik oleh seorang pekerja sosial dalam rangka mendorong atau merancang perubahan sosial agar tercipta keberfungsian sosial pada kliennya.

Ruang lingkup intervensi sosial dapat dilihat dalam tiga level yang ada, yakni level mikro, meso, dan makro. Ketiga level ini memiliki pendekatan yang berbeda dan disesuaikan dengan tingkat jangkauan permasalahan sosial di dalamnya serta intensitas ketiga level saling bersinergi dengan pendekatan teoritis pada kegiatan pembangunan sosial demikian halnya dalam proses perubahan sosial.

1. Intervensi Sosial di Level Mikro

Intervensi di level mikro merupakan kegiatan intervensi sosial yang dilakukan pada individu dan keluarganya yang mengalami permasalahan sosial.

2. Intervensi Sosial di Level meso

Intervensi sosial di level meso berbicara tentang pemulihan masalah individu melalui wadah sosialnya (seperti wadah kelompok, organisasi ataupun lembaganya).

3. Intervensi Sosial di Level Makro

Intervensi di level makro dalam pekerjaan sosial meliputi kegiatan pada lingkungan, komunitas dan masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial di dalamnya (Iskandar, 2017).

2.2.4. Metode Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial pada praktiknya menerapkan metode perubahan sosial yang direncanakan secara sistematis. Metode pekerjaan sosial merujuk pada prosedur kerja yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis oleh pekerja sosial untuk menyediakan layanan sosial. Metode yang digunakan oleh pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. *Social Casework* (Terapi Individu dan keluarga)

Perencanaan perubahan sosial yang diberikan kepada individu maupun keluarga umumnya adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari individu atau kelompok terkait sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran.

2. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial kelompok)

Perencanaan perubahan sosial pada kelompok atau *group work* sebuah layanan yang diberikan pada sebuah kelompok, bertujuan untuk memberikan bantuan agar setiap anggota kelompok memenuhi fungsi sosial, pertumbuhan atau

perubahan anggota kelompok. Metode *group work* merupakan metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau menyembuhkan suatu disfungsi sosial.

3. Metode *Community Organizazion and Community Development* (Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat)

Perencanaan perubahan sosial yang ditujukan kepada pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan proses penanganan yang berfokus pada upaya mengubah masyarakat yang lebih luas, serta menekankan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat (Taufiqurokhman, 2016:17).

2.2.5. Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Tahapan-tahapan intervensi (proses pertolongan) pekerjaan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap *Engagement, Intakedan Contact* (EIC)

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Dengan kondisi semacam itu maka pekerja sosial dapat menciptakan relasi pertolongan profesional yaitu sebagai suatu pola ekspektasi, interaksi dan interdependensi yang bersifat resiprokal antara pekerja sosial dengan klien, di mana pekerja sosial menyediakan dan menggunakan sumber-sumber tertentu untuk membantu klien dan klien dapat menggunakan sumber-sumber tersebut untuk memenuhi

kebutuhannya. Pada akhirnya dapat dibuat suatu kontak antara pekerja sosial dengan klien. Kontak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

2. Tahap Asesmen

Asesmen merupakan rangkaian kegiatan yang berfokus untuk menggali masalah klien, meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah, upaya pemecahan masalah yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini. Sehingga pada tahap ini dengan merujuk pada hal-hal tersebut, pekerja sosial dan klien dapat merumuskan fokus dan akar masalah klien. Dalam pelaksanaan asesmen ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap tepat.

3. Tahap membuat perencanaan intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan harus berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

4. Tahap Melaksanakan Program

Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai

melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus melakukan kilas balik serta menilai kembali terkait rangkaian proses penanganan yang sudah diberikan sehingga keberhasilan, kegagalan, serta hambatan yang terjadi dapat disimpulkan. Tujuan hasil dan tujuan proses merupakan dua aspek yang perlu dievaluasi.

6. Tahap Terminasi (Pengakhiran/Pemutusan kegiatan pertolongan)

Pemutusan kegiatan pertolongan dilaksanakan jika tujuan telah tercapai, terjadi rujukan ataupun adanya berbagai alasan rasional yang dipengaruhi berbagai macam faktor eksternal sehingga proses pertolongan diakhiri, selain itu pemutusan kegiatan pertolongan ini juga dilakukan ketika klien sebaiknya dipindahkan kepada lembaga maupun tenaga ahli yang sangat berkompeten.

2.2.6. Nilai-Nilai Pekerjaan Sosial

Nilai-nilai pekerjaan sosial adalah kerangka nilai (*body of value*) yaitu nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku, yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa atau masyarakat di mana pekerjaan sosial dilaksanakan. Kerangka nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman, mengarahkan serta membimbing sikap serta perilaku seorang pekerja sosial profesional sebagai pekerja sosial dan dalam hubungannya dengan klien, lembaga tempat bekerjanya, dengan sejawat profesional serta dengan masyarakat luas (Syamsuddin, 2017:35). Nilai-nilai yang

bersumber dari kerangka pengetahuan ilmiah pekerjaan sosial yang turut melengkapi kerangka nilai pekerjaan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Nilai tentang konsepsi orang yang mencakup:
 - a. Pekerja sosial percaya bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan dirinya sendiri.
 - b. Setiap orang mempunyai kemampuan dan dorongan untuk berubah, sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya.
 - c. Setiap orang mempunyai tanggungjawab kepada dirinya dan juga kepada orang lain di masyarakat.
 - d. Orang memerlukan pengakuan dari orang lain.
 - e. Manusia mempunyai kebutuhan, dan setiap orang pada prinsipnya unik serta berbeda dengan orang lainnya.
2. Nilai tentang masyarakat yang perlu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh setiap orang mencakup:
 - a. Masyarakat perlu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap orang, agar mereka dapat merealisasikan semua potensinya.
 - b. Menyediakan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan yang dialami.
 - c. Orang perlu diusahakan agar mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam masyarakatnya.
3. Nilai yang berkaitan dengan interaksi antar orang mencakup:
 - a. Pekerja sosial percaya bahwa orang yang mengalami masalah perlu dibantu

oleh orang lain.

- b. Pekerja sosial percaya bahwa di dalam usaha memecahkan masalah orang/klien, perlu respek dan diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri.
- c. Pekerja sosial percaya bahwa orang perlu dibantu dan diingatkan interaksinya dengan orang lain untuk membangun sesuatu masyarakat yang mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota/warganya.

2.2.7. Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Prinsip-prinsip praktik dalam pekerjaan sosial dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penerimaan merupakan prinsip pekerjaan sosial yang fundamental, yaitu dengan menunjukkan sikap toleran terhadap keseluruhan dimensi klien.
2. Tidak memberikan penilaian, hal ini berarti pekerja sosial menerima klien dengan apa adanya disertai prasangka atau penilaian.
3. Individualisasi berarti memandang dan mengapresiasi sifat unik dari klien. Setiap klien memiliki karakteristik keperibadian dan pemahaman yang unik, yang berbeda dengan setiap individu yang lain.
4. Menentukan sendiri, berarti memberikan kebebasan mengambil keputusan oleh klien.
5. Tampil apa adanya, berarti pekerja sosial sebagai seorang manusia yang berperan apa adanya, alami, tidak memakai topeng, pribadi yang asli dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.
6. Mengontrol keterlibatan emosional, berarti pekerja sosial mampu bersikap objektif dan netral.

7. Kerahasiaan, berarti pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan informasi seputar identitas, isi pembicaraan dengan klien, pendapat profesional lain atau catatan-catatan kasus mengenai diri klien (Syamsuddin, 2017:39).

2.2.8. Peran-Peran Pekerjaan Sosial

Peran-peran pekerjaan sosial di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Enabler*

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

2. *Broker*

Peran sebagai perantara (*broker*) yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang memerlukan bantuan atau layanan masyarakat kepada pihak yang memberikan layanan.

3. *Educator*

Sebagai pendidik, pekerja sosial diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat sasaran perubahan.

4. *Expert*

Sebagai tenaga ahli, pekerja sosial memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu, kelompok dan masyarakat).

5. *Social Planner*

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang

dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

6. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

2.3. Keberfungsian Sosial

2.3.1. Pengertian Keberfungsian Sosial

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja Sosial menyatakan bahwa keberfungsian sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugasnya dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial sebagai kemampuan individu orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat), dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial), dalam memenuhi/merespons kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi guncangan atau tekanan (Soeharto, 2017:28). Secara sederhana, keberfungsian sosial memiliki arti bahwa seseorang memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan peran

sosialnya dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosial (*shock and stress*). (Raharjo, 2017 dalam Apriliani, 2020).

Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam membangun hubungan sosial dan melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Keberfungsian individu mencakup pemahaman individu mengenai diri sendiri dan orang lain, pengendalian emosi, komunikasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada, serta keterampilan dalam menjalin hubungan dengan individu lainnya (Aisyah et al., 2024).

2.3.2. Karakteristik Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial memiliki tiga karakteristik yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Keberfungsian Sosial Efektif

Merupakan kondisi di mana sistem sumber dapat memenuhi kebutuhan keluarga, individu, kelompok, dan masyarakat. Sistem sumber yang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat membuat individu yang memiliki ketidakberfungsian sosial menjadi berfungsi sosial karena sistem pendukung yang baik dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, masyarakat, dan kelompok.

2. Keberfungsian Sosial Beresiko

Dikatakan beresiko karena terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat menghambat individu dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan efektif. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu, keluarga, kelompok sosial, atau bahkan masyarakat yang menyebabkan individu sulit dalam menjalani fungsi

sosialnya.

3. Keberfungsian Sosial Maladaptif

Merupakan suatu kondisi di mana sistem tidak mampu untuk beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan manusia, hal ini terjadi karena adanya masalah pada sistem sumber yang gagal memberikan peluang pada individu sehingga membuat ia menjadi tidak berfungsi secara sosial. Artinya, individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang dimilikinya, dan juga tidak dapat menjalankan peran sosialnya dengan optimal (Huda dalam Aisyah et al., 2024).

2.4. Konsep Pelayanan Sosial

2.4.1. Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah bentuk upaya untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Pelayanan sosial mencakup berbagai kegiatan atau program yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, pelayanan sosial juga mencakup penyediaan fasilitas dasar seperti udara bersih, sanitasi yang layak, dan layanan kesehatan (Manik & Dwita, 2025).

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara individual, langsung dan terorganisasi sertamemiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam

pelayanan adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka (Hikmawati & Rusmiyati, 2011).

Pelayanan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan sosial (*social policy*) yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan. Namun demikian, pemberian pelayanan sosial bukan merupakan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pelayanan sosial adalah kegiatan yang terorganisir atau seperangkat program yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan individu, kelompok atau masyarakat, terutama mereka yang mengalami kesulitan hidup (Suharto, 2007). Makna kata “sosial” pada pelayanan sosial menunjuk pada target atau sasarannya: yakni orang banyak atau publik. Jadi, kata sosial tidak lagi terbatas pada makna karitatif atau non-profit saja. Karena pelayanan sosial yang profesional bisa saja berorientasi profit.

2.4.2. Tujuan Pelayanan Sosial

Tujuan utama dari pelayanan sosial adalah untuk memajukan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup, khususnya bagi kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Manik & Dwita, 2025). Pendapat lain menyebutkan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat secara umum memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Agar masalah-masalah yang dihadapi oleh individu-individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi (*reduction of problem*).
2. Agar standar kualitas hidup individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan (*to enhanced of qualities of*

life) dari kualitas hidup sebelumnya yang berada dalam kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang baik.

2.4.3. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagaiberikut:

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dengan penyesuaian sosial
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi (Husmiati, 2020:14).

Sementara itu, Richard McTimuss juga mengemukakan fungsi pelayanan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat sebagaiberikut:

1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
2. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (suatu program tenaga kerja).
3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk

melindungi masyarakat.

4. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial (misalnya kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya).

2.4.4. Model Pelayanan Sosial

Model pelayanan sosial dapat dilihat dari cakupan dan kesinambungannya serta penyelenggara pelayanan sosial. Pelayanan sosial berdasarkan cakupan dan kesinambungannya dapat diklasifikasikan kedalam empat model, yaitu:

1. Model *residual-universal* yang melihat bahwa pelayanan sosial harus diberikan secara parsial namun pelayanan yang diberikan harus mencakup banyak penerima.
2. Model *institutional-universal*, melihat bahwa pelayanan sosial diselenggarakan melembaga dan berkelanjutan dengan mempunyai cakupan yang luas.
3. Model *residual-selektif* yang melihat pelayanan sosial harus diberikan secara parsial dan diberikan kepada kelompok terbatas serta berjangka pendek.
4. Model *residual-institutional* yang melihat pelayanan sosial diberikan secara melembaga dan berkelanjutan (Suharto dalam Mulyana et al., 2018).

2.4.5. Pelayanan Sosial di Sekolah Luar Biasa (SLB)

Pendidikan inklusif adalah sistem yang menerima semua anak tanpa diskriminasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan individu (Sukadari, 2020). Hal ini diperkuat oleh (Filasofa, 2022), yang menyatakan bahwa pembelajaran inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka yang menerima semua siswa, dan

perbedaan fisik atau mental mereka. Untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang sesuai, tanpa diskriminasi, dan dengan penghargaan penuh terhadap perbedaan individu (Asrani & Mukmin, 2025).

Pelayanan dan penanganan khusus sangat penting karena setiap jenis anak berkebutuhan khusus menghadapi masalah yang berbeda. Dengan perhatian dan layanan yang tepat, terutama dalam pengembangan keterampilan hidup yang sesuai dengan minat dan potensi mereka, anak berkebutuhan khusus dapat menjadi lebih mandiri. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi memberikan perhatian khusus agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan potensinya dan memenuhi kebutuhan belajarnya dalam kurikulum reguler. Ini memungkinkan keberagaman kemampuan dan cara belajar dalam satu kelas. Pendidikan inklusi dapat menjadi solusi untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan, memungkinkan mereka menempuh pendidikan formal dan berkembang sesuai kemampuan mereka, serta menjalankan fungsi sosial dengan menampung semua anak tanpa memandang perbedaan (Setiawan, 2025).

2.5. Konsep Masalah Sosial

2.5.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah akan sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang yang menilainya tidak sebagai masalah (Soetarso dalam Huraerah, 2011:4).

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta pemecahan aksi sosial secara kolektif (Horton dan Leslie dalam Suharto (2000)). Dari definisi ini dapat disimpulkan, masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Dengan demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran “baik” atau “buruk” sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan dari individu atau masyarakat yang merasakannya. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multi dimensional dan menyangkut banyak orang.

2.5.2. Dimensi Masalah Sosial

Masalah sosial dapat dipahami melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Setiap masalah bersifat multi dimensional dalam pengertian adanya jaringan faktor-faktor fisik, mental, dan sosial.
2. Dimensi struktural dan klinis. Masalah sosial berdimensi struktural kalau faktor penyebabnya berakar pada struktur masyarakat, seperti masalah sosial yang terjadi di Indonesia. dimensi klinis, kalau masalah sosial berakar pada kekurangan atau kelemahan pada diri individu.
3. Dimensi absolut dan relatif, misalnya yang terjadi pada kemiskinan. kemiskinan disebut absolut kalau indikator kemiskinannya berlaku di manapun juga di dunia ini, baik di negara maju maupun berkembang (Huraerah, 2011:6).

2.5.3. Faktor-Faktor Masalah Sosial

Masalah sosial terbentuk oleh kombinasi faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri orang (ketidakmampuan, kecacatan, gangguan jiwa, dan sebagainya) dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial (keluarga, sekolah, lingkungan tetangga, lingkungan kerja, dan sebagainya) berat ringannya suatu masalah sosial yang dialami oleh penyandang kerap kali bergantung faktor-faktor penyebab yang dialaminya serta variable-variabel di dalam dirinya, terutama persepsi, kebutuhan, nilai, kemampuan, harapan, pengalaman dan perasaannya (Soetarso dalam Huraerah, 2011:8).

2.5.4. Masalah Sosial Tunagrahita

Penyandang disabilitas khususnya tunagrahita menjadi permasalahan sosial

yang membutuhkan solusi secara integral agar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terealisasi (Lestari et al., 2024). Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas sering kali dipandang memiliki kelemahan bawaan dan disebut sebagai penyandang cacat, kelainan, dan berkebutuhan khusus, seperti yang terjadi pada tunagrahita (Unairnews, 2024).

Sering kali tunagrahita sebagai penyandang disabilitas mengalami perlakuan yang berbeda dan terdiskriminasi. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasannya tersebut, sehingga beberapa di antara banyak yang mengalami peminggiran atau eksklusi secara sosial di lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Adanya peminggiran atau eksklusi tersebut mengakibatkan minimnya peran bagi penyandang disabilitas (Lestari et al., 2024).

2.6. Konsep Dukungan Sosial

2.6.1. Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu dari orang lain maupun kelompok dukungan sosial. mengacu pada pemberian kenyamanan, kepedulian dan penghargaan serta bantuan yang diterima oleh individu dari orang lain atau kelompok dengan merawat, menerima dan menghargainya, lebih lanjut individu yang mendapatkan dukungan sosial akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa dirinya dicintai, dirawat, dihargai, berharga dan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang berarti dari lingkungannya (Sarafino dan Smith dalam Supriyati, 2023).

Dukungan sosial digambarkan sebagai bantuan untuk menciptakan perasaan

ketenangan dan kemampuan individu mengatasi stres. Artinya, dukungan sosial merupakan salah satu bentuk pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang sedang mengalami masalah. Hal ini bertujuan agar orang yang sedang mengalami masalah dapat mencapai perasaan yang lebih tenang sehingga dapat mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahannya (dalam Wulandari, 2021). Selain itu dukungan sosial adalah persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan. Dukungan sosial juga dapat dikatakan sebagai tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi.

Dukungan sosial merupakan hadirnya orang-orang tertentu yang secara pribadi memberi nasihat, motivasi, arahan dan menunjukkan jalan keluar ketika individu mengalami masalah dan pada saat mengalami kendala dalam melakukan kegiatan secara terarah guna mencapai tujuan (Nurfianti et al., 2023). Definisi mengenai dukungan sosial tersebut menyatakan bahwa dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan diri individu, khususnya ketika seorang individu sedang mengalami masalah. Dengan hadirnya dukungan sosial dari orang-orang terdekat, mampu membangun keyakinan pada diri individu serta meningkatkan kemampuannya dalam upaya penyelesaian masalah.

Dukungan sosial adalah sebuah tindakan yang bersifat membantu yang melibatkan emosi, pemberian informasi, bantuan instrumen, dan penilaian positif pada individu dalam menghadapi permasalahannya. Artinya, dukungan sosial adalah berbagai macam tindakan yang melibatkan segala komponen yang ada pada diri individu (Apollo dan Cahyadi, 2012:261).

2.6.2. Fungsi Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang diberikan dan diterima oleh setiap individu setidaknya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dukungan harga diri dimana pada saat individu mengalami ancaman harga diri, seperti meningkatnya keraguan akan kemampuan diri maka sumber-sumber interpersonal meniadakan dengan membicarakan masalah yang dihadapi. Dukungan ini dapat berupa perhatian, menawarkan simpati, dan meyakinkan kembali. Elemen penting dari dukungan ini berupa perasaan diterima dan dihargai.
2. Sebagai dukungan informasi dimana saat individu tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi maka dukungan ini dilakukan dengan memberikan informasi, nasihat, dan petunjuk tentang cara-cara pemecahan masalah.
3. Sebagai dukungan instrumental dimana dukungan ini bersifat nyata berbentuk materi yang bertujuan untuk meringankan beban bagi individu.
4. Sebagai kekuatan sosial untuk memberikan kepuasan instrinsik bagi individu untuk mengatasi rasa kesepian dan memberikan kepuasan serta menciptakan kehangatan berkawan serta penerimaan individu dalam kelompok (Az-Zahrah, 2018).

2.6.3. Jenis-Jenis Dukungan Sosial

Jenis dukungan sosial menurut terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Dukungan emosi, yaitu meliputi ungkapan rasa empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu.
2. Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung atau bantuan tidak

langsung yang bersifat materi dan bersifat nyata (kasat mata). Contoh: memberi makanan, membantu membersihkan tempat tidur.

3. Dukungan informasi mencakup pemberian nasihat, saran atau umpan balik kepada individu.
4. Dukungan penghargaan terjadi melalui ungkapan positif pada individu, dorongan untuk maju, atau persetujuan akan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan yang positif individu dengan orang lain (Sarafino dalam Supriyati, 2023).

2.6.4. Faktor-Faktor Dukungan Sosial

Setidaknya ada tiga faktor penting yang mendorong seseorang memberikan dukungan sosial, di antaranya:

1. Empati, yaitu turut merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan mengantisipasi emosi dan motivasi tingkah laku untuk mengurangi kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan orang lain.
2. Norma dan Nilai Sosial, yang berguna untuk membimbing individu untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan.
3. Pertukaran sosial, yaitu hubungan timbal balik perilaku sosial antara cinta, pelayanan, informasi. keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi hubungan interpersonal yang memuaskan. Pengalaman akan pertukaran secara timbal balik ini membuat individu lebih percaya bahwa orang lain akan menyediakan dukungan (Myers dalam Afifah & Luawo, 2020)

2.6.5. Sumber-Sumber Dukungan Sosial

Sumber dukungan sosial didapatkan dari banyak pihak yang terlibat langsung

dalam interaksi sehari-hari. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Dukungan Sosial Formal

Sumber ini disediakan oleh lembaga atau organisasi publik, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan organisasi nirlaba. Sumber dukungan formal biasanya terorganisir dan memiliki peran yang jelas dalam memberikan dukungan sosial. Contohnya adalah skema bantuan sosial dari pemerintah seperti skema bantuan kesehatan dan skema bantuan keuangan, dan biasanya memerlukan prosedur administratif tertentu untuk menerima dukungan sosial.

2. Dukungan Sosial Informal

Sumber dukungan ini dapat diperoleh dari keluarga, teman, dan tetangga. sumber dukungan sosial informal biasanya tidak terstruktur dan spontan, artinya dukungan sosial diberikan secara alamiah dan tanpa peran yang jelas. Sumber dukungan informal ini dapat berupa dukungan emosional, dukungan informasi dan dukungan instrumental.

3. Dukungan Sosial Personal

Sumber dukungan ini mengacu pada dukungan sosial yang berasal dari hubungan interpersonal antar individu. sumber dukungan sosial pribadi dapat berupa hubungan romantis, pasangan hidup, atau hubungan sosial yang lebih intim. Karena dukungan sosial personal biasanya kuat dan mendalam, maka dukungan ini dapat memberikan dukungan sosial yang lebih efektif untuk mengatasi masalah.

2.6.6. Dukungan Sosial Keluarga

Dukungan sosial keluarga merupakan bantuan yang diterima oleh salah satu

anggota keluarga dari anggota keluarga yang lainnya. Dukungan keluarga merupakan bentuk dukungan yang menjadi sumber dukungan praktis dan konkret bagi anggota keluarga lainnya. Bentuk dukungan dapat berupa finansial, merawat anggota keluarga yang sakit, melakukan tugas rumah tangga, menggantikan peran anggota keluarga yang sakit, dan memanfaatkan fasilitas serta materi yang ada untuk keperluan perawatan. bentuk dukungan keluarga lainnya dapat berupa kualitas dukungan yang baik dan bersifat komprehensif, menunjukkan sikap empati, memberikan fasilitas dan menyediakan informasi yang dibutuhkan (Putra, 2019:12).

2.7. Konsep Kemandirian

2.7.1. Pengertian Kemandirian

Istilah kemandirian berasal dari kata “diri” maka kemandirian tidak akan lepas membahas mengenai perkembangan dari diri seorang individu. Kemandirian juga merupakan salah satu aspek penting pada individu. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bebas melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya (Patriana, 2007 dalam Situmorang et al., 2025).

Istilah kemandirian juga menunjukkan adanya keyakinan yang di mana kemandirian mampu membantu individu dalam menyelesaikan masalah tanpa adanya bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri akan menunjukkan kualitas

sebagai individu yang cakap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu mampu mengambil keputusan sendiri kemudian memiliki inisiatif serta kreatif. Kemandirian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan diri serta berperan signifikan dalam membangun kapasitas untuk menghadapi tantangan hidup (Situmorang et al., 2025).

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan individu tanpa bergantung pada orang lain, ditunjukkan oleh kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, anak yang mandiri adalah anak yang dapat mengambil keputusan sendiri terkait aktivitas dan kebutuhan sehari-hari (Situmeang et al., 2023).

2.7.2. Jenis-Jenis Kemandirian

Jenis-Jenis kemandirian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian sosial dan emosi, yakni aspek kemandirian yang menyatakan kekuatan hubungan emosional antar individu.
2. Kemandirian fisik dan fungsi tubuh, maksudnya adalah kemandirian dalam hal memenuhi kebutuhan. Misalnya, anak butuh makan, maka secara mandiri anak harus bisa makan sendiri, dan lain sebagainya.
3. Kemandirian intelektual, dapat dilihat dari bagaimana anak dapat menyelesaikan tugas sekolahnya sendiri dan anak diberikan kesempatan untuk mengerjakan semua tanggung jawab, tetap dengan pengawasan orang tua.
4. Menggunakan lingkungan untuk belajar serta dapat membantu orang lain untuk belajar mandiri. Anak dapat mandiri jika ia diberikan ruang untuk

mengeksplor apa yang disenanginya tanpa dibantu atau ikut campur oleh orang dewasa atau lainnya. Anak akan menjadi mandiri begitu ia nyaman dengan lingkungannya.

5. Membuat keputusan dan pilihan, yakni kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab merupakan kemandirian tingkah laku (dalam Endriani et al., 2020).

2.7.3. Aspek-Aspek Kemandirian

Kemandirian memiliki 5 (lima) aspek yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bertindak Bebas, yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri bukan karena orang lain dan tak tergantung pada orang lain.
2. Progresif dan ulet, ditunjukkan dengan adanya usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan.
3. Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara orisinal, kreatif, penuh inisiatif.
4. Pengendalian dari dalam (*internal locus of control*), ditunjukkan dengan adanya perasaan mampu menghadapi permasalahan yang ada, kemauan mengendalikan tindakan serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usaha sendiri.
5. Kemantapan diri, yang ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri, menerima dirinya, dan memperoleh kepuasan dari usahanya (Masrun, dkk dalam Darsono, 2019).

2.7.4. Faktor yang Memengaruhi Kemandirian

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemandirian seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Genetik atau keturunan Orang Tua

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi sering kali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Namun faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian yang diturunkan kepada anaknya melainkan sifat orang tuanya yang muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya.

2. Pola Asuh Orang Tua

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan memengaruhi perkembangan kemandirian anak, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak.

3. Sistem Pendidikan di Sekolah

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi tanpa argumentasi serta adanya tekanan *punishment* akan menghambat kemandirian seseorang. Sebaliknya, adanya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian *reward* dan penciptaan kompetitif positif akan memperlancar perkembangan kemandirian anak.

4. Sistem Kehidupan di Masyarakat

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai

manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian (Ali dan Asrori dalam Darsono, 2019).

2.7.5. Kemandirian Tunagrahita

Kemandirian saat ini menjadi aspek yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas, sebab kemandirian merupakan aspek yang penting dalam kehidupan. Kemandirian harus tetap diberikan dan dilatih pada anak tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Kemandirian pada disabilitas, termasuk tunagrahita tidak ada proses menilai, melainkan menyesuaikan keadaan sekarang, tanpa membandingkan dengan keadaan yang dahulu, sehingga tidak ada perasaan-perasaan atau stigma negatif terhadap diri sendiri (Zikra & Putri, 2024).

Kemandirian pada penyandang tunagrahita diartikan sebagai mampu menghadapi kondisi yang mana kondisi tersebut bisa menjadikan disabilitas untuk hidup mandiri demi mencapai masa depan yang lebih baik. Lewat kemandirian, penyandang tunagrahita bisa memilih arah hidupnya untuk menjadi lebih berkualitas. Tidak hanya ada pada diri individu yang normal, tetapi juga terdapat dalam diri individu yang mengalami keterbatasan seperti tunagrahita. Kemandirian yang dialami penyandang disabilitas, khususnya tunagrahita akan terealisasi ketika mereka sanggup menghadapi kondisi yang membuat mereka mandiri baik itu dalam bersikap dan mengambil keputusan (Muharany, 2020 dalam Imansyah & Muhid, 2022).

2.8. Konsep Anak

2.8.1. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang sedang dalam suatu rentang perkembangan

yang dimulai dari bayi hingga remaja yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, perilaku sosial, dan pola koping (Rahmawati dalam Fahlepi, 2026). Anak-anak memiliki kebutuhan emosional yang harus terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kehadiran keluarga khususnya orang tua dalam memberikan dukungan emosional berupa kasih sayang (Geograf, 2023).

Anak merupakan individu yang unik dan bagian dari makhluk sosial yang membutuhkan perhatian khusus untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya yang ditandai dengan pertumbuhan (*growth*) dan perkembangan (*development*). Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Hak yang harus diberikan oleh orang tua meliputi pendidikan jasmani, rohani, serta akal agar anak bisa berkembang dan mampu mengatasi berbagai masalah hidup, serta menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (Hamadah, 2021).

2.8.2. Kebutuhan Dasar Anak

Pemenuhan kebutuhan dasar pada anak memiliki peranan penting dalam masa

pertumbuhan dan perkembangannya. Pemenuhan kebutuhan dasar anak (pola asuh) yang berfokus pada kebutuhan fisik sampai biomedis, (pola asih) mencakup dalam pemenuhan kebutuhan emosi atau kasih sayang untuk memberikan rasa mengasihi serta rasa aman kepada anak dan (pola asah) mencakup kebutuhan stimulasi mental yang diberikan dengan memberi pendidikan dan pelatihan kepada anak sesuai dengan perkembangan usia mereka (Kartikasari et. al., 2024). Konsep kebutuhan asuh, asah, dan asih merupakan pendekatan pengasuhan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Pendekatan ini menggambarkan bahwa pertumbuhan optimal pada anak hanya dapat dicapai apabila anak memperoleh dukungan fisik yang memadai, stimulasi perkembangan yang terus-menerus, serta perhatian emosional dari lingkungan terdekatnya (Arieska, 2026:27).

Adapun ragam kebutuhan dasar anak yang terkait pada pola asuh, asah, dan asih adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisik Biomedis Anak (Asuh)

Kebutuhan asuh menggambarkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan perlindungan tubuh, yang mencakup penyediaan makanan bergizi, lingkungan yang aman, akses terhadap layanan medis, serta pembiasaan hidup bersih untuk menunjang pertumbuhan jasmaninya.

2. Kebutuhan Stimulasi Mental/Kognitif (Asah)

Kebutuhan asah merupakan aspek perkembangan yang berfokus pada pemberian stimulasi yang sistematis untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, memperkaya kreativitas, meningkatkan kapasitas belajar, serta membangun

keterampilan sosial anak, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi kognitif dan cara berinteraksi secara lebih adaptif sesuai tahap pertumbuhan.

3. Kebutuhan Emosional dan Kasih Sayang (Asih)

Kebutuhan asih mencakup kebutuhan anak untuk merasakan kasih sayang, perhatian yang konsisten, serta kedekatan emosional dengan orang tua atau pengasuh, karena hubungan emosional yang aman dan penuh kehangatan ini menjadi kebutuhan dasar yang membantu membentuk rasa percaya, stabilitas psikologis, dan fondasi bagi perkembangan kepribadian anak di masa mendatang.

2.8.3. Tahapan Tumbuh Kembang Anak

Piaget (1936) membagi tahapan perkembangan anak menjadi empat fase atau tahapan, di antaranya:

1. Fase Sensorik-Motorik (0-2 Tahun)

Pada fase ini, anak mempunyai sifat yang sangat egosentris dan sangat terpusat pada diri sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan pada fase ini bersifat fisik, yang berfungsi membuat anak lebih cepat menguasai keterampilan untuk melangkah ke fase selanjutnya.

2. Fase Pra-Operasional (2-7 Tahun)

Fase ini dibagi menjadi dua, yaitu fase pra konseptual dan fase intuitif. Pada fase pra konseptual (2-4 tahun), anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan bermasyarakat dengan dunia kecilnya. Sedangkan pada fase intuitif (4-7 tahun), anak semakin mampu bermasyarakat namun ia belum mampu untuk berpikir secara timbal balik. Pada fase ini, anak banyak memperhatikan dan meniru orang lain terutama orang yang

lebih dewasa darinya.

3. Fase Operasional Konkrit (7-11 tahun)

Pada fase ini, anak memiliki kemampuan yang lebih mantap dari pengalaman sebelumnya. Anak mulai menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta belajar menerima pendapat yang berbeda dengan pendapatnya sendiri.

4. Fase Operasional Formal (11-16 tahun)

Pada fase akhir ini kemampuan berfikir anak akan mencapai taraf kemampuan berfikir orang dewasa. Tercapainya kemampuan ini memungkinkan remaja untuk masuk ke dalam dunia pendidikan yang lebih kompleks, yaitu dunia pendidikan tinggi.

2.9. Konsep Tunagrahita

2.9.1. Pengertian Tunagrahita

Pengertian tunagrahita memiliki perkembangan sesuai dengan periode perubahan peristilahan untuk tunagrahita. Menurut AAIDD (*American Association of Intellectual and Development Disabilities*) adalah ketidakmampuan yang ditandai dengan keterbatasan yang signifikan di kedua fungsi yaitu fungsi intelektual dan perilaku adaptif, yang mencakup banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari. Ketidakmampuan ini terjadi sebelum usia 18. fungsi intelektual juga disebut kecerdasan yang mengacu pada kapasitas mental umum, seperti belajar, penalaran, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, anak yang mempunyai kondisi tunagrahita akan menunjukkan ciri-ciri intelegensi yang rendah atau deficit dalam perilaku adaptif (Alfiansyah & Nadhirah, 2024).

Anak tunagrahita adalah individu yang memiliki kecerdasan jauh di bawah

kecerdasan normal. Menurut *American Association on Mental Deficiency*, retardasi mental didefinisikan sebagai suatu gangguan dimana fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata yaitu IQ 84 ke bawah. Biasanya anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam “*Adaptive Behaviour*” atau penyesuaian perilaku. Artinya anak tunagrahita tidak dapat mencapai kemandirian sesuai standar kemandirian dan tanggung jawab anak normal lainnya serta akan mengalami masalah dalam kemampuan akademik dan berkomunikasi dengan kelompok usia sebaya (Napitulu et. al., 2022).

Berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut anak tunagrahita pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu menjelaskan tentang anak yang memiliki keterbatasan intelegensi di bawah rata-rata dan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari (Amanullah, 2022).

2.9.2. Klasifikasi Tunagrahita

Menurut AAMD (*American Association on Mental Deficiency*), penyandang tunagrahita dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tunagrahita Ringan (Mampu Didik)

Dicirikan dengan tingkat kecerdasan IQ yang berkisar 50-70 mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana.

2. Tunagrahita Sedang (Mampu Latih)

Dicirikan dengan tingkat kecerdasan IQ berkisar 30-50. Pada kondisi ini

terdapat beberapa kemampuan yakni, dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri (*self-help*), mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan.

3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat (Mampu Rawat)

Dicirikan dengan tingkat kecerdasan IQ kurang dari 30 dengan hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Namun, masih ada yang mampu untuk dilatih dalam mengurus diri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas.

2.9.3. Masalah yang Dihadapi Tunagrahita

Berikut adalah beberapa kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh anak tunagrahita:

1. Kesulitan dalam kehidupan sehari-hari

Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari kondisi keterbatasan, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang masih memerlukan bimbingan terutama kategori grahita berat dan sangat berat. Masalah yang sering dijumpai adalah masalah keseharian seperti kegiatan memakai baju, memakai sepatu, makan, menggosok gigi, dan lain sebagainya.

2. Kesulitan Belajar

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang tunagrahita tentu mengalami kesulitan dalam proses belajar. Masalah yang sering dirasakan dalam proses belajar mengajar di antaranya adalah kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan

dalam berpikir, daya ingat yang lemah, dan sebagainya.

3. Kesulitan dalam penyesuaian diri

Dilihat dari keterbatasan tunagrahita, cenderung masih banyak yang masih bergantung pada orang lain terutama pada keluarga (orang tua), dan masih sedikit sekali yang sudah dapat hidup mandiri, serta masalah gangguan kepribadian maupun emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak tunagrahita sangat terbatas dalam penyesuaian diri dengan lingkungan di luar keluarga, seperti lingkungan bermasyarakat.

2.9.4. Karakteristik Tunagrahita

Berikut merupakan karakteristik pada penyandang tunagrahita yang di antaranya:

1. Terlambat atau terbelakang dalam perkembangan mental dan sosial
2. Mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, didengar sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara
3. Mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda (*visual perception*) dan suara (*audiotary perception*)
4. Keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami tunagrahita menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai dengan usianya.

2.10. Konsep Keluarga

2.10.1. Pengertian Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau

ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Fadhilah & Yuliarsih, 2024:2).

Keluarga adalah sekumpulan manusia yang memiliki hubungan darah perkawinan dan adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum yaitu meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota (Harmoko, 2012 dalam Putra, 2019).

2.10.2. Fungsi Keluarga

Fungsi pokok keluarga secara umum di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi afektif, yaitu fungsi utama dalam mengajarkan keluarga segala sesuatu dalam mempersiapkan anggota keluarga dapat berinteraksi dengan orang lain.
2. Fungsi sosialisasi, yaitu fungsi dalam mengembangkan dan mengajarkan anak bagaimana berkehidupan sosial sebelum anak meninggalkan rumah dan berinteraksi dengan orang lain di luar rumah.
3. Fungsi reproduksi, yaitu fungsi untuk mempertahankan keturunan atau generasi dan dapat menjaga kelangsungan keluarganya.
4. Fungsi ekonomi, yaitu keluarga yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu sehingga meningkatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Fungsi perawatan, yaitu fungsi dalam mempertahankan status kesehatan keluarga dan anggota keluarga agar tetap produktif (Friedman & Bowden dalam Arna, 2024)

2.10.3. Tipe Keluarga

Tipe keluarga terdiri dari 3 (tiga) yang di antaranya:

1. Keluarga inti (pasangan suami-istri) adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak, baik yang lahir dari pernikahan, adopsi, atau keduanya.
2. Keluarga orientasi (keluarga asli), merupakan unit keluarga dimana seseorang dilahirkan.
3. Keluarga besar terdiri dari keluarga inti dan orang-orang yang memiliki hubungan darah, yang terdiri dari anggota keluarga asal atau salah satu dari keluarga inti, seperti kakek, nenek, bibi, paman, keponakan, dan sepupu (Salamung et, al., dalam Arna, 2024).

2.11. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 penelitian sebelumnya

No	Komponen	Keterangan
1	Nama penulis	Muhammad Rizky Imansyah
	Judul Artikel	Upaya meningkatkan kemandirian Pada Penyandang Disabilitas melalui Pelatihan kemandirian ADL (<i>Activity Daily Life</i>)
	Nama Jurnal	PeKSOS : Jurnal Ilmiah pekerjaan Sosial Vol. 21 No. 1, Juni 2022
	Metode	Metode kualitatif dengan pendekatan <i>Literature Review</i> .
	Hasil	Dapat disimpulkan bahwa pelatihan kemandirian kehidupan sehari-hari memiliki pengaruh pada peningkatan kemandirian penyandang disabilitas.
	URL	https://share.google/w6bRhgAtwPhGMXQGO
2	Nama penulis	Fitria Dayanti, Farid Pribadi
	Judul Artikel	Dukungan Sosial keluarga penyandang Disabilitas dalam keterbukaan Akses pendidikan
	Nama Jurnal	SOSIOHUMANIORA : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora
	Metode	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi
	Hasil	Terlibatnya orang tua dalam pendidikan anak menunjukkan bahwa keluarga khususnya orang tua telah memberikan dukungan penuh pada pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bersekolah.
	URL	http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio
3	Nama penulis	Helsa Nasution, M. Agung Rahmadi, Luthfiah

No	Komponen	Keterangan
		Mawar, Milna Sari
	Judul Artikel	Dampak Dukungan Sosial terhadap kesehatan mental penyandang Disabilitas
	Nama Jurnal	<i>Counseling For All</i> : Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 4 No. 2 edisi September 2024
	Metode	Kuantitatif dengan pendekatan <i>cross-sectional</i>
	Hasil	Penelitian ini telah berhasil mengungkap hubungan signifikan antara dukungan sosial dan kesehatan mental pada penyandang disabilitas di Indonesia.
4	URL	https://doi.org/10.57094/jubikon.v4i2.1999
	Nama penulis	Alfia Fadhila Husna, Hastin Trustisari
	Judul Artikel	Dukungan Sosial Bagi Anak Dengan disabilitas
	Nama Jurnal	Jurnal <i>Saint Student Research</i> Vol. 3 No. 6, Desember 2025
	Metode	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan <i>literature review</i> .
	Hasil	Dukungan sosial keluarga merupakan suatu hal yang mendasar dan penting bagi perkembangan anak dengan disabilitas. bentuk dukungan sosial yang meliputi dukungan emosional, instrumental, informasi dan penghargaan secara keseluruhan berkontribusi dalam peningkatan keberfungsian sosial, kemandirian, kepercayaan diri, dan memengaruhi prestasi anak dengan disabilitas baik secara akademik maupun non-akademik.
	URL	https://doi.org/10.61722/jssr.v3i6.6270
	Nama penulis	Vira Rahmiwanti, Hartosujono
	Judul Artikel	Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan kemandirian Pada Penyandang Tuna Daksa di Pusat rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Bantul
	Nama Jurnal	Jurnal SPIRITS, Vol. 5 No. 2, me 2015
5	Metode	Kuantitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan hipotesis yaitu ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan kemandirian pada penyandang tuna daksa. Semakin tinggi tingkat dukungan sosial maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian yang dilakukan, dan semakin rendah tingkat dukungan sosial maka semakin rendah pula kemandirian penyandang tuna daksa.
	URL	https://doi.org/10.30738/spirits.v5i2.1062
	Nama penulis	Anisza eva Saputri, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari
	Judul Artikel	Dukungan Sosial keluarga Bagi Orang dengan Disabilitas Sensorik
6		

No	Komponen	Keterangan
	Nama Jurnal	Prosiding penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Metode	Studi Literatur
	Hasil	Keluargamerupakan lingkungan sosial terdekat dan pentingsebagaisistem sumber dukungan yang dapat meningkatkankeberfungsian sosial.
	URL	https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22783
7	Nama penulis	Lya Fayola Zen, Hadiyanto Abdul Rachim, Nurliana Cipta Apsari
	Judul Artikel	Penggunaan Teknologi Asistif : Peningkatan kemandirianpenyandang Disabilitas Fisik
	Nama Jurnal	SHARe Social Work Jurnal
	Metode	Studi kepustakaan
	Hasil	Dapat ditarik kesimpulan bahwa melaluipendekatantersebut dapat diciptakannya masyarakat yang memahami, mendukung, dan memungkinkanpenyandang disabilitas untuk mencapaipotensipenuhmereka, menjalani hidup yang bermakna, dan menjadikontributor yang berharga dalam kehidupan kita.
	URL	https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/52420/24632
8	Nama penulis	Sriwardani
	Judul Artikel	P eran Dukungan Sosial Orang Tua dalam meningkatkankemandirian Anak <i>Down Syndrome</i>
	Nama Jurnal	Almustofa : <i>Journal of Islamic Studies and Research</i> 2025
	Metode	Kualitatif deskriptik
	Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, orang tua yang memberikan dukungan kepada anak mereka dapat meningkatkankemandirian anak <i>down syndrome</i> . Dalam meningkatkankemandirian anak <i>down syndrome</i> orang tua perlumemberikan dukungan penuh supaya anak dapat mandiri secara optimal, tanpa adanya lagi bantuan dari orang tua mereka.
	URL	https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/173/43
9	Nama penulis	Fanny Fadilla, Muhammad Muhid Alwi
	Judul Artikel	peran Dukungan Orang Tua dalam mengembangkan kemandirian Anak Disabilitas Netra yang bersekolah di sekolah Luar Biasa Negeri Jember
	Nama Jurnal	<i>Indonesian Journal of Disability Research</i>
	Metode	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Dapat disimpulkan bahwa kemandirian anak disabilitas netra yang bersekolah di SLBN Jember masih belum tercapai secara total atau dapat dikatakan belum mandiri sepenuhnya dipengaruhi

No	Komponen	Keterangan
		oleh faktor dalam diri seperti hilangnya fungsi penglihatan sehingga memengaruhi pengalaman belajar. Adapun faktor luar atau lingkungannya yakni kedua orang tua yang terkadang memanjakan atau cenderung belum mampu bersabar membiarkan anak belajar dengan dirinya sendiri.
	URL	https://disabilitas.uinkhas.ac.id/index.php/IJDR/article/view/19/15
10	Nama penulis	Badruk Zaman, Miniharianti, Jihan Rabial
	Judul Artikel	Hubungan Dukungan Sosial keluarga terhadap kemandirian Pasien Skizofrenia di Wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Pidie
	Nama Jurnal	Jurnal keperawatan Dirgahayu, Volume 5 Nomor 1 Maret 2023
11	Metode	Analitik
	Hasil	Ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kemandirian pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Simpang Tiga Kabupaten Pidie
	URL	https://pdfs.semanticscholar.org/71de/24b6e0e6db5ff15b3ea75238f41277a12f16.pdf

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan temuan pada hasil penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya, masih menunjukkan adanya keterbatasan dan celah yang perlu diisi. Di mana, penelitian-penelitian yang telah mengkaji fenomena yang serupa masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang menjadi fokus penelitian penulis. terdapat perbedaan baik dari sisi fokus penelitian, konsep penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, maupun metode yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu melengkapi keterbatasan dan celah pada penelitian terdahulu serta memberikan kebaruan baik secara teoretis maupun praktis.

2.11. Kerangka Pemikiran

A. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang

melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Soeharto 2014:1).

B. Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Profesi ini berfungsi untuk melakukan analisis kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial, mengembangkan sumber daya manusia, melakukan penyembuhan sosial, rehabilitasi sosial, mencegah timbulnya masalah sosial, memberdayakan kelompok rentan, dan lain sebagainya (Purwowibowo, 2011).

C. Variabel X Dukungan Sosial Keluarga

Pembahasan mengenai dukungan sosial keluarga ini sesuai dengan konsep terkait keluarga yang menyatakan bahwa keluarga merupakan sekumpulan manusia yang memiliki hubungan darah perkawinan ataupun adopsi yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yaitu meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Oleh karena itu, dukungan sosial keluarga merupakan sumber dukungan utama yang bersifat praktis dan konkrit bagi setiap anggota keluarga. (Harmoko dalam Putra, 2019).

Dukungan sosial keluarga merupakan bantuan yang diterima oleh salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga lainnya yang meliputi aspek dukungan emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis agar anggota keluarga merasa

aman, dukungan instrumental untuk menyediakan sumber daya yang dapat membantu anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dukungan informasi untuk memberi arahan dalam menentukan tindakan yang tepat, serta dukungan penghargaan untuk memperkuat penilaian positif pada diri setiap anggota keluarga (Kelana, 2022). Artinya, dukungan sosial keluarga merupakan dukungan yang bersifat komprehensif bagi setiap anggota keluarga di dalamnya.

D. Variabel Y Kemandirian Anak Tunagrahita

Pembahasan mengenai kemandirian merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri, progresif dan ulet, penuh inisiatif, mampu mengendalikan diri dan memengaruhi lingkungan, serta memiliki kemantapan diri yang kuat (Masrun et. al., dalam Darsono, 2019).

Istilah kemandirian juga menunjukkan adanya keyakinan-keyakinan di mana kemampuan tersebut dapat membantu individu menyelesaikan masalahnya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri akan menunjukkan kualitas sebagai individu yang cakap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, yaitu mampu mengambil keputusan sendiri kemudian memiliki inisiatif serta kreatif. Kemandirian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan diri serta berperan signifikan dalam membangun kapasitas untuk menghadapi tantangan hidup (Situmorang et al., 2025).

Pembahasan mengenai kemandirian tersebut menunjukkan bahwa kemandirian merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada individu, termasuk pada anak tunagrahita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada

anak tunagrahita, kemandirian dapat diartikan sebagai mampu menghadapi suatu kondisi di mana kondisi tersebut dapat menjadikannya untuk hidup mandiri demi mencapai masa depan yang lebih baik.

Pada anak tunagrahita yang memiliki keterlambatan berpikir dan keterbatasan dalam merawat diri serta menerima informasi yang ada di lingkungannya, sekurang-kurangnya memerlukan dua kemandirian yang harus dimiliki yaitu keterampilan dasar (*life skills*) seperti menulis, membaca, komunikasi lisan, dan menghitung, serta keterampilan mengurus diri dalam kehidupan sehari-hari atau *Activity Daily Living* (ADL) (Yani & Mulyaningsih, 2026).

E. Hubungan Antara Variabel X Dukungan Sosial dengan Variabel Y Kemandirian

Dukungan sosial keluarga merupakan suatu hal yang mendasar dan penting bagi perkembangan anak dengan kedisabilitas. Bentuk dukungan sosial yang meliputi dukungan emosional, instrumental, informasi dan penghargaan secara keseluruhan berkontribusi dalam peningkatan keberfungsian sosial, kemandirian, kepercayaan diri, dan memengaruhi prestasi anak dengan kedisabilitas baik secara akademik maupun non-akademik (Husna dan Trustisari, 2025).

Orang tua yang memberikan dukungan kepada anak mereka dapat meningkatkan kemandirian anak *down syndrome*. Dalam meningkatkan kemandirian anak *down syndrome* orang tua perlu memberikan dukungan penuh supaya anak dapat mandiri secara optimal, tanpa adanya lagi bantuan dari orang tua mereka (Sriwardani, 2025).

Hasil temuan pada penelitian tersebut memperkuat bahwa terbentuknya

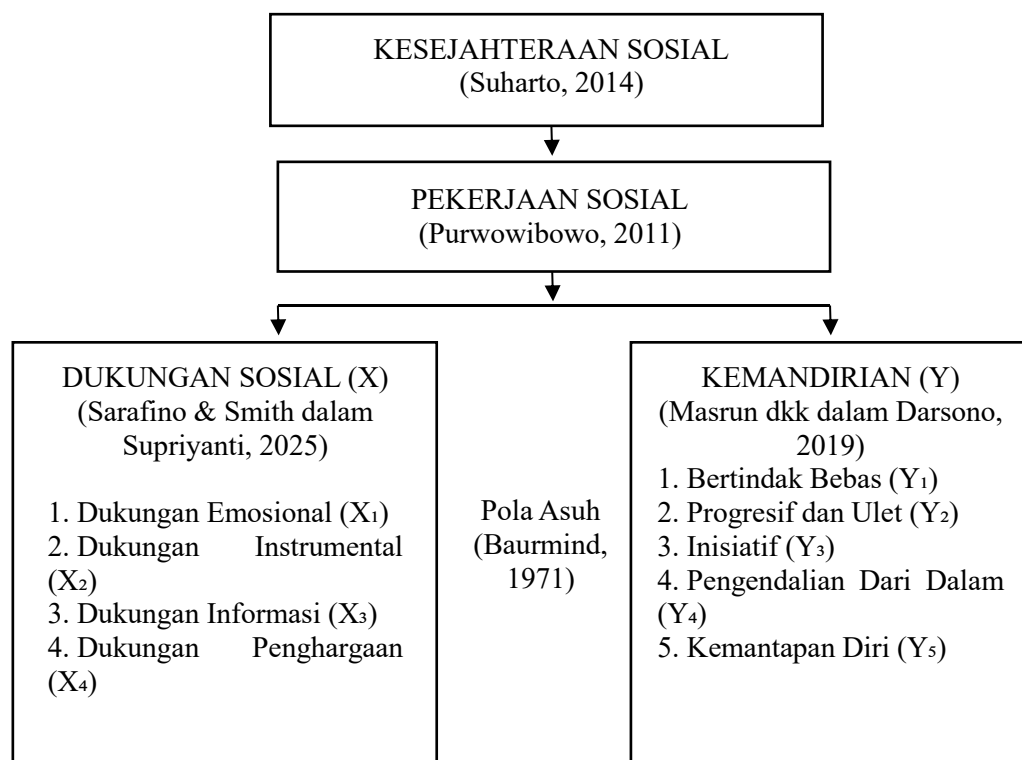
kemandirian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya melalui pemberian dukungan sosial yang tepat dan optimal bagi anak tunagrahita. Sehingga, pada anak tunagrahita yang memiliki keterbatasan dan kesulitan dalam mencapai kemandirian, dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga merupakan bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dalam interaksi di dalam keluarga. Hal tersebut juga mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, di mana hak tersebut dapat diperoleh melalui pilar dukungan keluarga yang diberikan secara optimal kepada anak dengan kedisabilitasannya, sehingga hak-hak yang termuat dalam Undang-Undang dapat terpenuhi dan anak dapat berfungsi secara sosial.

Keterkaitan antara dukungan sosial keluarga dengan kemandirian pada anak tunagrahita dapat dipahami melalui teori pola asuh yang dikemukakan oleh Diana Baumrind. Teori ini menjelaskan bahwa pola asuh merupakan *parental control* yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju kedewasaan (Tobing dan Nurjannah, 2024). Pada anak tunagrahita, pola asuh merupakan faktor yang sangat penting di dalam tumbuh kembangnya, selain itu anak juga memerlukan pendampingan yang konsisten untuk melatih kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dukungan sosial keluarga yang mencakup dukungan emosional, instrumental, informasi, dan penghargaan merupakan bagian dari praktik pola asuh yang dilakukan oleh orang tua. Melalui pola asuh yang tepat, hangat, serta responsif, dukungan sosial yang diberikan tidak hanya mampu

membuat anak merasa diterima dan dihargai, tetapi juga mendorong anak untuk berani memulai dan mencoba sesuatu dengan kemampuannya sendiri sehingga dapat membangun kepercayaan diri serta meningkatkan kemampuan adaptif yang berperan penting dalam proses anak tunagrahita mencapai kemandirian.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran pada penelitian ini menempatkan dukungan sosial keluarga sebagai variabel yang berhubungan dengan kemandirian pada anak tunagrahita. Sedangkan teori pola asuh merupakan jembatan yang menghubungkan teori pada kedua variabel tersebut. Variabel dukungan sosial dengan variabel kemandirian berada pada konsep kesejahteraan sosial sebagai landasan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Penelitian, 2026